

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMENPORA DALAM PEMBINAAN ATLET MENEMBAK PELATNAS MENUJU OLIMPIADE TOKYO 2020**

**Paragra Duncan Taruma Negara Fuji Sentausa**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,

Universitas Negeri Surabaya

[paragraduncan62@gmail.com](mailto:paragraduncan62@gmail.com)

**Tjjik Rahaju**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

[tjjikrahaju@unesa.ac.id](mailto:tjjikrahaju@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Pembinaan atlet merupakan salah satu langkah terpenting yang harus dicapai untuk mewujudkan cita-cita semua Negara, termasuk Indonesia. Pembinaan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan prestasi bangsa Indonesia melalui berbagai bidang; termasuk Olah Raga. Upaya dalam membina atlet terus ditingkatkan oleh pemerintahan di negara manapun. Harahap menyebut ini sebagai respon pemerintah Indonesia untuk menghasilkan atlet-atlet berprestasi merujuk pada UU No. 3/2005 yang menjadi landasannya. Melalui pembinaandan pengembangan ini, kami memastikan ada pemerataan akses kepada olahraga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan kinerja, dan mengelola olahraga yang mungkin menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan dalam kehidupan nasional dan global. Pembinaan olah raga dilakukan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Pembinaan tersebut juga mencakup untuk Pendidikan, Rekreasi dan prestasi. Artikel ini membahas tentang pembinaan atlet terutama yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan prestasi. Seperti yang diketahui Hasil olah raga jelas terukur. Singkatnya, pelatihan olahraga dilakukan dengan pendekatan saintifik, mulai dari pencarian bakat hingga operasi pelatihannya. Olahraga dan pembinaan atlet menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Terlebih dalam cabang-cabang olah raga yang diarahkan agar dapat meraih prestasi. Penelitian ini juga berfokus pada atlet nasional dalam rangka pembinaan yang bertujuan untuk membentuk atlet berbakat dan mengetahui bagaimana perjalanan atlet menembak hingga sampai pada tingkatan internasional yang dipersiapkan untuk berkompetisi dalam ajang bergengsi Olimpiade Musim Panas 2020 dan Pekan Olahraga Nasional 2021 yang diselenggarakan di Papua.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Atlet, Pembinaan, Olimpiade

### **Abstract**

*Coaching athletes is one of the most important steps that must be achieved to realize the ideals of all countries, including Indonesia. This coaching is also part of efforts to create achievements of the Indonesian nation through various fields; including sports (Harahap, 2018). Efforts in fostering athletes continue to be improved by governments in any country. Harahap called this the Indonesian government's response to produce outstanding athletes referring to Law no. 3 of 2005 which is the basis. Through this coaching and development, it is hoped that it will ensure equal access to sports, health and fitness, performances, and manage sports that can facing the challenges and demands of changing nationals and global's life. Sports coaching is carried out by both the government and local governments. The coaching also includes for Education, Recreation and achievement. This article discusses the development of athletes, especially those carried out by the government to create achievements. As is known, sports achievement is something that is visible and measurable, meaning that sports coaching is carried out with a scientific approach starting from talent scouting to the training process. Sports coaching and athlete development are inseparable parts. Especially in sports that are directed at achieving achievements. This research focuses on national athletes in the framework of coaching that aims to form talented athletes and know how athletes shoot to the International Level who are prepared to compete in the prestigious Summer Olympics Tokyo, Japan 2021 and National Sports Week 2021 held in Papua.*

**Keywords:** Regulation Implementation, Atlet, Training, Olympic

## PENDAHULUAN

Kata atlet identik dengan "olahraga", Atlet profesional harus rela mengorbankan waktu untuk melindungi bangsa dan negaranya. Olahraga juga bisa sukses melalui olahraga, yang membuatnya menarik bagi mereka yang mempraktikkannya. Jika seorang atlet dapat meraih kemenangan dan prestasi olahraga di ajang internasional, maka atlet tersebut dapat disambut dan dipuja, dan ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi atlet tersebut. Atlet terampil mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Kalaupun ada pernyataan bahwa merah putih bisa terbang dan menyanyikan lagu kebangsaan, itu bukan hal baru. Ini adalah momen dimana para atlet berhasil meraih prestasi diajang internasional di negara lain. Sebagai juara olahraga yang mengharumkan nama Indonesia di dunia, bangsa memiliki kewajiban untuk menjamin kehidupan di hari tua. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pemuda tentunya segera setelah memasuki turnamen harus berterima kasih atau berterima kasih kepada pemain yang menang selain sertifikat, tanda layanan, dana pelatihan, dll, dan bentuk-bentuk berikut: Hadiah: Ada . Nilainya ratusan atau miliaran rupiah tergantung tingkat pencapaiannya, seperti uang tunai, rumah/rumah, mobil, dll (Dwi Prayogo Utomo. 2018).

Pemerintah Mempertimbangkan perlunya sistem olahraga nasional agar pendidikan dan pengembangan olahraga nasional dapat menjamin pemerataan akses olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan kinerja dan manajemen olahraga. Ini membutuhkan tantangan dan perubahan dalam kehidupan lokal dan global. Hal ini sejalan dengan misi pembukaan UUD 1945. "untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Sektor olahraga berperan dalam semua upaya pembangunan nasional tersebut. Pasal 3 dan Pasal 4 menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pengaturan kegiatan olahraga. Di satu sisi, tidak hanya mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial, tetapi juga berfungsi untuk membentuk watak dan kepribadian bangsa yang layak. Disisi lain, bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional, meningkatkan

ketabahan nasional, dan meningkatkan harga, harkat, dan kehormatan nasional(Mahatma Chryсна. 2020).

Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kemampuan para atlet untuk bersaing dalam Olimpiade Nasional atau Internasional. Komite Olimpiade Indonesia (KOI) beserta jajarannya merencanakan program Indonesia Emas yang merupakan program pemerintah untuk menciptakan atlet andalan nasional yang mampu berprestasi dalam kejuaraan nasional dan internasional seperti pekan olahraga antar negara dikawasan Asia Tenggara (SEA Games),di benua Asia (Asian Games) dan negara-negara di seluruh dunia untuk beberapa cabang olahraga tertentu (Puspodari, 2013).

Kebijakan yang diberikan oleh Kemenpora untuk menciptakan Atlet menembak berbakat tentu saja sudah dilakukan. Ketentuan soal atlet berprestasi diatur dalam Perpres No. 95/2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Di dalam peraturan presiden tersebut, atlet berprestasi dipilih oleh induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti pemusatan latihan nasional untuk kemudian ditetapkan oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Atlet berprestasi berada di pemusatan latihan untuk jangka waktu yang lama sebagai persiapan mengikuti kejuaraan-kejuaraan internasional seperti *SEA Games-Asean Para Games, Asian Games-Asian Para Games* dan Olimpiade Paralimpiade. Atlet berprestasi yang masuk ke dalam pemusatan latihan nasional memperoleh fasilitas penuh, ditanggung seluruhnya, mulai dari sandang, pangan, papan dan honor bulanan (Kemenpora, 2018).

Honor per bulan yang didapat atlet berprestasi juga akan ditambah bonus uang tunai dari negara jika sang atlet berhasil meraih medali di kompetisi internasional. Bonus akan semakin besar mengikuti tingkat kompetisi yang diikuti atlet, terlebih jika Indonesia menjadi tuan rumah. Seperti saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-18, tahun 2018, di kota Jakarta-Palembang, dan Asian Para Games ke-3 tahun 2018, di Jakarta (Kemenpora, 2018b). Selain bonus uang tunai, Pemerintah Indonesia juga mengangkat atlet berprestasi yang meraih medali di Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Setkab.go.id, 2018).

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo sangat memperhatikan perkembangan olahraga dan mengapresiasi atlet-atlet yang berprestasi. Fakta itu diantaranya terlihat dalam Instruksi Presiden No. 3/2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, Perpres No. 95/2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang ia terbitkan, maupun dengan mengapresiasi atlet-atlet berprestasi peraih medali Olimpiade Paralimpiade, Asian Games, Asian Para Games, dan SEA Games, Asean Para Games (Jurnal Keolahragaan)

Salah satu upaya pemerintah dalam mendongkrak atau membangun tatanan pembinaan olahraga di Indonesia sebagai dasar untuk pembinaan berjenjang dan berkelanjutan adalah mendirikan berbagai pusat pembinaan olahraga di kalangan pelajar yang merupakan cikal-bakal atlet yang memiliki prestasi. Hal ini sesuai dengan UU No. 3/2005 Berkenaan dengan Pasal 27 ayat (5) tentang Keolahragaan Nasional, pembinaan dan pembinaan olahraga prestasi mengikutsertakan atlet muda potensial berdasarkan hasil pengamatan, eksplorasi dan pengembangan bakat sebagai proses pembaharuan. Kebijakan publik adalah suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan pemerintah dengan stakeholders dalam mengatur mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik (Mulyadi dalam Asyiah, Adnan dan Mubarak 2017).

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan Olahraga merupakan salah satu pilar dalam menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani yang menunjang produktivitas sumber daya manusia. Selain itu, olahraga dapat membangun kepribadian dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamika, dan etika kerja keras. Hasil olahraga dapat meningkatkan harkat dan martabat negara di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan negara, serta memperkokoh ketahanan negara. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan olahraga mengacu pada tiga konsep:

1. Konsep Tradisional
2. Konsep *House of sport*
3. Konsep pembangunan olahraga aktual ala Inggris

Pada tahun 2005 sebuah kebijakan ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU No. 3/2005 tentang SKN) (Ma'mun, 2019). Ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan pengembangan/pembangunan nasional melalui olahraga. Salah satu cabang olahraga yang menjadi perhatian adalah cabang olahraga menembak. Hal ini tidak luput dari banyaknya medali dan prestasi yang disumbangkan pada cabang olahraga tersebut.

Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) merupakan Induk Organisasi Olahraga Menembak Nasional yang bertanggung jawab untuk membina, mengembangkan serta mengelola seluruh kegiatan Olahraga Menembak, oleh karenanya setiap atlet menembak harus menjadi Anggota Perbakin dan dibuktikan dengan memiliki Kartu Anggota Perbakin (KTA Perbakin) fungsinya agar secara legal bisa menggunakan Senjata sesuai dengan Peruntukannya.

Selain Perbakin, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) juga mempunyai peran yang penting untuk melakukan pembinaan atlet. Merujuk pada UU No. 3/2005 tentang Keolahragaan Nasional, yang mengatur tentang pembinaan, pembinaan, pengembangan dan koordinasi seluruh kegiatan olahraga prestasi di Indonesia sesuai dengan visidannya KONI.

Perlu diketahui untuk menjadi anggota Perbakin, seseorang wajib memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan serta lulus dalam Test Penataran dan Pelatihan, biasanya tempat penataran dan pelatihan tersebut tersedia pada club di daerah domisili tempat tinggal calon anggota masing-masing yang ingin menyalurkan hobi dalam hal menembak dan berburu yang apabila terlatih dan berbakat akan bisa menjadi atlet.

## **METODE**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan mengamati tingkah laku dari orang-orang yang ingin diteliti. Menurut Sugiyono (2008:11) mengatakan bahwa penelitian deskriptif menggambarkan suatu gejala sosial yang muncul pada masyarakat. Menurut Sugiyono (Dalam Wibisono dan Tukiman 2017)

menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, observasi sebagai cara untuk mendapatkan informasi. Kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi berguna untuk mendapatkan data mengenai proses implementasi kebijakan dalam pembinaan atlet olimpiade Tokyo 2020. Penelitian dilakukan dengan meninjau langsung lokasi Penelitian nya yang berada di Lapangan Tembak Senayan, Jalan Gelora No.1 Senayan, Tanah Abang RT.01 RW.03 Gelora, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang diberikan oleh Kemenpora untuk menciptakan Atlet menembak berbakat tentu saja sudah dilakukan. Ketentuan soal atlet berprestasi di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Di dalam peraturan presiden tersebut, atlet berprestasi dipilih oleh induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti pemusatan latihan nasional untuk kemudian ditetapkan oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Hal ini juga berlaku kepada cabang olahraga menembak.

Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) merupakan Induk Organisasi Olahraga Menembak Nasional yang bertanggung jawab untuk membina, mengembangkan serta mengelola seluruh kegiatan Olahraga Menembak, oleh karenanya setiap atlet menembak harus menjadi Anggota Perbakin dan dibuktikan dengan memiliki Kartu Anggota Perbakin (KTA Perbakin) fungsinya agar secara legal bisa menggunakan Senjata sesuai dengan Peruntukannya.

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi para atlet nasional mendapat pembinaan serius dari pemerintah melalui berbagai kebijakan, dan prestasi para atlet nasional meningkatkan harkat dan martabat Indonesia di kancah internasional. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan prestasi atlet nasional pemerintah pusat atau daerah berkomitmen untuk melaksanakan berbagai

kebijakan untuk meningkatkan prestasi atlet nasional. Hal ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) UU No.3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN). Artikel ini memaparkan beberapa poin terkait kebijakan pemerintah terhadap atlet nasional (Indonesia, 2005) meliputi: 1. Kebijakan pembentukan federasi olahraga, seperti organisasi dan klub olahraga. 2. Kebijakan pendirian pusat olahraga dan pengembangan ilmu dan teknologi olahraga. 3. Kebijakan peningkatan prestasi atlet nasional. 4. Kebijakan pendidikan atau pelatihan atlet nasional. 5. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan atlet nasional. 6. Kebijakan pembentukan sistem olahraga dan pengembangan bakat atlet nasional. 7. Kebijakan pembentukan sistem informasi olahraga untuk meningkatkan prestasi atlet nasional. 8. Kebijakan dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk membangun satu cabang olahraga dengan standar internasional.



**Gambar1. Briefing program kebijakan membahas pelatnas guna menghadapi olimpiade 2020**

Sumber : Data Internal Pelatnas 2020

Banyak aspek yang harus dilakukan dalam kegiatan pelatnas dan event olimpiade 2020. Dalam hal ini, para olahragawan sangat dituntut untuk lebih berpotensi dalam meningkatkan kemampuannya untuk bertanding. Masalah-masalah yang terjadi terhadap atlet dan pelatih sudah merupakan tanggung jawab bagi Pemerintah dan para pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah Dispora, KONI, FORMI dan pihak-pihak lain yang ikut dalam bidangke olahragaan. Sebelum pengiriman atlet dilaksanakan terlebih dahulu para atlet dilakukan pemusatan latihan, di mana para atlet diberikan pelatihan yang lebih fokus sehingga nanti diharapkan mampu mendapatkan prestasi yang gemilang. Pada saat pemusatan latihan para atlet pelajar diberikan dana pemusatan pelatihan selama beberapa hari. Dana tersebut adalah untuk menambah semangat atlet dalam bertanding. Perbakin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mempunyai Peran yang penting untuk melakukan pembinaan atlet. Mengacu UU No. 3 Th 2005 tetang Keolah ragaan Nasional

mengatur tentang pembinaan, pembinaan, pengembangan dan koordinasi seluruh kegiatan olahraga prestasi di Indonesia. Sesuai dengan Visi dan Misi KONI. Implementasi kebijakan yang dilakukan bertumpu pada 4 aspek penting sebagai berikut :

1. Pembinaan
2. Pengawasan
3. Kesehatan
4. Psikologis

Pembinaan atlet yg ada di pelatnas di lakukan melalui tahap pemilihan atlet yg sangat ketat dan sangat terpilih, tidak semua atlet bisa untuk masuk di dalam pelatnas. Syarat untuk bias masuk di dalam pelatnas adalah melalui pengambilan-pengambilan nilai dari berbagai event lomba daerah maupun nasional yang nilainya sudah di tentukan oleh Kemenpora hal itu di peruntukan untuk bisa bersaing dengan atlet luar negeri tentunya agar atlet Indonesia bias meraih juara di ajang kejuaraan dunia.

Cabang olahraga menembak sampai saat ini menjadi salah satu cabang yang telah menyumbang banyak piala untuk Indonesia baik nasional maupun internasional. Atlet Menembak yang berbakat tentu sangat mengharumkan nama bangsa Indonesia karena prestasinya, semua orang memahami untuk merebutkan Medali Emas (*Gold Medals*) pada setiap pertandingan memerlukan latihan dan kerja keras, tidak hanya fisik namun ketenangan jiwa dan pikiran juga sangat dibutuhkan dalam hal tersebut. Maka dari itu pembinaan untuk para atlet olahraga khususnya olahraga menembak sangatlah penting, karena dengan meningkatkan kondisi fisik guna menunjang akitvitas olahraga dalam mencapai prestasi (Jurnal, Puspodari, *Evaluasi Kondisi Fisik Atlet Prima Pratama dan Atlet Siap Grak Koni Surabaya*, 2013).



**Gambar 2. Kegiatan Rutin Menembak di Lapangan Tembak Perbakin Senayan.**

Sumber : Data Internal Perbakin

Para atlet cabang menembak ini memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan, pengawasan, dan pembinaan, ini tertulis dalam UU No. 3/2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Pasal

6 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa “memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan”. Pembinaan olahraga menjadi sangat penting dilakukan karena olahraga menjadi salah satu asset bangsa yang sangat berharga (Bahtiar, 2018).

Kesehatan juga menjadi faktor penting dalam pembinaan atlet cabang menembak. Aspek kesehatan merupakan salah satu bidang indikator dalam pembangunan nasional suatu negara, dengan negara tersebut memiliki masyarakat yang sehat berarti negara tersebut sudah bias dikatakan sebagai negara maju (Rowe, 2015). Dalam pengimplementasian kebijakan tentunya memerlukan suatu sistem untuk menerapkan paradigma ‘pembangunan melalui olahraga’ tersebut melalui suatu kebijakan yang tentunya dirancang, ditetapkan serta diaplikasikan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut (Won & Hong, 2015), yang tentunya memiliki fungsi sebagai pemangku kebijakan dalam sistem pemerintahan suatu Negara.

Untuk pencapaian suatu prestasi atlet perlu adanya sarana sebagai tempat para atlet dan pelatih melakukan rutinitas latihan agar kemampuan para atlet bias berhasil dengan optimal. Dalam hal ini, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tiga belas sarana olahraga yang sudah masuk dalam penarikan biaya dan sudah diatur dalam Perda No. 9/2014 aturan tentang Retribusi Daerah, sedangkan sarana olahraga yang belum ada penarikan retribusi sebanyak enam sarana olahraga. Semua komponen ini akan sangat mendukung dalam keberhasilan peningkatan atlet berprestasi baik dari segi pendanaan maupun sarana dan prasaran olahraga.

Penelitian menurut Noer dan Sirait (2021) ada 6 variabel acuan terhadap kebijakan implementasi olahraga: (a) standar ukuran/tujuan dan sasaran kebijakan, (b) sumberdaya, (c) karakteristik organisasi pelaksana, (d) sikap para pelaksana, (d) komunikasi antar organisasi pelaksana, dan (e) lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang akan dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Standar ukuran/tujuan dan sasaran kebijakan**

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bias jadi gagal ketika para pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Pelaksana kebijakan mungkin bias jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebelum membuat kebijakan

terlebih dahulu tentunya sudah dilakukan pengkajian tentang kebutuhan dari sipelaku kebijakan, hal ini dilakukan guna menjawab semua kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Selanjutnya kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan ataupun pelaksanaan yang mendukung program kerja pemerintah. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat pelaksana kebijakan, atau kelompok-kelompok pemerintah dan/atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Kebijakan yang telah dibuat harus mempunyai capaian dalam suatu ukuran dan tujuan yang lebih jelas dan terarah, hal ini dilakukan agar kebijakan mencapai keberhasilan yang maksimal. Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengatur, mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan program yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya manusia adalah asset dalam pengimplementasian kebijakan. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan dan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tahapan dalam proses implementasi juga harus dapat dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Sumberdaya manusia harus memiliki kompetensi di bidangnya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Jika kemampuan para pelaksana tidak sesuai dengan kebijakan yang diberikan maka keberhasilan suatu program dalam kebijakan tidak akan terpenuhi, apalagi jika kebijakan tersebut adanya unsur-unsur politik yang harus dijalankan tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut dianggap gagal. Seringkali kita mendengar bahwa terhambatnya suatu program ataupun kegiatan dikarenakan adanya kekurangan dalam penganggaran suatu pelaksanaan kegiatan, sehingga apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan tidak berhasil seperti yang sudah direncanakan.

Hal ini sangat sering terjadi dan dapat memberi dampak negatif terhadap pengembangan dan pembinaan masyarakat terkait bidang keolahragaan. Komponen sarana dan prasarana juga merupakan hal yang penting juga, di mana ini adalah merupakan satu kesatuan dalam mensukseskan kebijakan, tanpa adanya sarana dan prasarana mustahil kebijakan

tersebut dapat berjalan dengan baik. Namun terkadang sarana dan prasarana juga tidak memenuhi persyaratan untuk kelayakan dalam penggunaannya. Hal ini juga merupakan masalah yang sangat krusial yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya Sarana dan prasarana menjadikan salah satu tolak ukur dari keberhasilan program perencanaan pemerintah dalam pelayanan prima ke masyarakat. Kaitan dengan hal tersebut Pemerintah harus konsentrasi dalam peningkatan perbaharuan sarana dan prasarana agar menunjang program dan kegiatan kebijakan keolahragaan khususnya.

Sumber daya manusia adalah penggerak dari keseluruhan kebijakan keolahragaan, tanpa adanya sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan mustahil kebijakan tersebut akan berjalan. Sumberdaya yang handal akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja para pelaksana tersebut hal ini dapat terlihat dalam sebuah organisasi yang mana organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya sumberdaya manusia yang akan menjalankan organisasi tersebut. Untuk itu sumberdaya manusia mempunyai peranan sangat penting terhadap keberhasilan pengimplementasian kebijakan keolahragaan. Dari hasil penelitian ini ditemukan adanya sumberdaya manusia yang cukup handal dalam pengembangan dan pembinaan atlet-atlet berprestasi, di mana para pelatih dan atlet dapat bekerja sama untuk menjalankan kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat berfungsi dengan optimal. Para pelatih yang mempunyai sertifikasi yang cukup baik akan mampu menjadi ujung dari keberhasilan peningkatan prestasi atlet.

Kedua, ketersediaan dana. Masalah anggaran ini akan menjadi hal yang sangat krusial terlebih segala bentuk kegiatan harus diawali dengan adanya ketersediaan dana dalam suatu organisasi. Peranan dana ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembinaan peningkatan atlet. Anggaran sudah menjadi masalah yang umum yang sampai saat ini Pemerintah pusat ataupun daerah belum secara optimal dapat mengatasinya. Dalam menjalankan kebijakan perlu adanya dukungan atau peran dari pemangku kepentingan lainnya. Anggaran yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan keolahragaan cukup banyak, diawali dengan kegiatan pembibitan atlet lalu pembinaan, pengembangan sampai pada tahap akhir peningkatan prestasi atlet. Kesemuanya ini menjadi satu kesatuan untuk tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan keolahragaan yang akan berdampak pada peningkatan prestasi atlet.

Ketiga, sumberdaya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah hal yang sangat konflik karena sarana dan prasarana sangat membutuhkan biaya

yang cukup besar dan harus terencana dari semua aspek dalam mendukung implementasi kebijakan. Sumberdaya Sarana dan prasarana ini sangat erat hubungannya dengan kebijakan keolahragaan. Sumber daya sarana dan prasarana akan membuktikan dari tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Dimana kebijakan tersebut harus dapat memfasilitasi seluruh aspek yang berkaitan dalam peningkatan pengembangan dan pembinaan para atlet-atlet. Sumber daya sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat diperhatikan mengingat banyaknya cabang olahraga yang membutuhkan untuk tempat latihan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki cabang olahraga menembak sudah sangatlah bagus dan memadai untuk para atlet melakukan latihan rutin.

### **3. Karakteristik Organisasi Pelaksanaan**

Organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali dan dipimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu misalnya lingkungan, cara atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa sumber daya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Orang-orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang akan memimpin operasional organisasi dengan terencana.

Tugas pokok dan fungsi dalam suatu organisasi sangat diperlukan pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Oleh sebab itu perlu adanya kecocokan para pelaksana terhadap kebijakan yang akan dijalankan. Organisasi sebagai pengurus cabang olahraga sangat dibutuhkan karena dengan adanya kepengurusan maka dalam pencapaian akan pelaksanaan program maupun kegiatan akan sesuai dengan output yang diharapkan. Oleh karena itu keharmonisan suatu kepengurusan dalam cabang olahraga juga sangat mempengaruhi terhadap kualitas terhadap peningkatan atlet berprestasi. Dari hasil penelitian variabel ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana ini cukup baik, di mana keterlibatan antara organisasi formal dan informal yang saling bersinergi dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan atlet berprestasi.

### **4. Sikap atau disposisi para pelaksana**

Kebijakan publik dapat terlaksana apabila arah dan tujuannya sudah jelas, sehingga para pelaksana dapat melaksanakan dengan baik dan benar. Para individu harus dapat memahami apa yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam hal ini

sikap para pelaksana harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada atasan ataupun kepada sesama pelaksana. Penyampaian komunikasi harus jelas dan terurai dalam penjabarannya, karena apabila sipelaksana menyalah artikan penerimaan informasi maka akan mengalami gangguan baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Sikap pelaksana harus mampu menunjukkan kemauannya dalam melaksanakan suatu instruksi atau perintah dari atasan, karena jika sikap pelaksana menunjukkan penolakan dari para pelaksana maka hal ini akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Beberapa informasi yang dapat diterima oleh para pelaksana diantaranya secara verbal ataupun secara tulisan. Jika secara verbal mungkin masih bias mengurangi kesalahpahaman dalam mengimplementasikan kebijakan, tetapi jika komunikasi tersebut secara disposisi yang berupa tulisan singkat maka penjabaran ini bias disalahartikan. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan harus benar-benar memahami dan menguasai apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi.

Implementasi Kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Dari uraian di atas diharapkan para pemangku kepentingan mampu menjadi jembatan kepada seluruh pelatih ataupun atlet agar apa yang menjadi masalah masalah mereka dilapangan akan dapat diselesaikan dengan baik, untuk itu perlunya suatu arahan atau instruksi yang baik sangatlah dibutuhkan. Dalam suatu organisasi hubungan antara pelatih dan atlet ibarat hubungan antara orangtua dan anak. Hubungan dan komunikasi yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Komunikasi yang terjalin juga harus cukup terarah agar apa yang dituju akan tercapai. Dari hasil penelitian pada variabel ini ditemukan bahwa hubungan dalam organisasi Perbakin sudah sangatlah baik dan kolaborasi setiap pihak sangatlah terarah dan jelas.

### **5. Komunikasi antar organisasi pelaksana**

Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan atau ide dari seseorang ke orang lain. Komunikasi dalam suatu organisasi sangat diperlukan, hal ini dikarenakan komunikasi sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini bias saja terjadi karena kebijakan yang dilaksan akan adalah bukan kebutuhan dari masyarakat setempat yang mengenal betul akan permasalahan yang mereka hadapi, akan tetapi kebijakan publik tersebut biasanya bersifat dari atas kebawah sehingga memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui atau bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Pentingnya

suatu komunikasi dalam organisasi guna mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan dapat dilaksanakan.

Seringnya kegagalan implementasi kebijakan dikarenakan kepentingan-kepentingan para pimpinan, sehingga berdampak terhadap pola pikir dan pandangan para pelaksana terhadap implementasi kebijakan. Disamping itu, kemampuan dan kemauan para pelaksana juga harus dipertanyakan, apakah para pelaksana sudah mengetahui betul dan paham akan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan dan ketiga Intensitas terhadap kebijakan.

Dari elemen tersebut merupakan satu kesatuan dari serangkaian keberhasilan implementasi kebijakan. Pengetahuan pelaksana akan isi dari kebijakan sangat menentukan hasil dari kebijakan, pemahaman dan pendalaman isi dari kebijakan juga sangat memegang peranan yang penting agar pada saat pelaksanaannya kebijakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Minat atau Intensitas para pelaksana juga sangat diperlukan. Hubungan yang baik akan terlihat dari keberhasilan komunikasi yang dijalin apakah komunikasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya. Peranan *stake holder* dalam komunikasi terhadap apa yang menjadi permasalahan di para atlet adalah sangat dibutuhkan. Dengan adanya komunikasi yang baik akan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik pula. Dari hasil penelitian pada variable ini menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi pelaksana sudah berjalan cukup optimal hal ini terlihat dari kolaborasi para pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan dengan tujuan untuk peningkatan para atlet berprestasi. Saling melengkapi kekurangan sesama organisasi di bidang keolahragaan juga menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang tujuan akhirnya adalah peningkatan atlet berprestasi.

#### **6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal dapat berperan aktif dalam keberhasilan kebijakan keolahragaan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik akan sangat mempengaruhi terhadap kegagalan para atlet dalam

peningkatan prestasi, di mana pada zaman ini banyaknya pengaruh-pengaruh buruk dari media sosial yang sangat dominan.

Oleh sebab itu perlu adanya peran pemangku kepentingan dalam menghadapi permasalahan yang ada agar tidak terjadinya hambatan dalam melaksanakan tujuan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, hal ini terlihat dari keberhasilan tingkat ekonomi yang cukup tinggi di Perbakin dengan banyaknya pusat-pusat perbelanjaan yang besar, juga banyaknya penggalangan bidang keolahragaan yang dilaksanakan senam setiap hari Jumat di kantor Perbakin.

#### **PENUTUP**

##### **Simpulan**

Suatu negara harus memberikan perhatian khusus kepada sistem keolahragannya, termasuk Indonesia, khususnya peningkatan prestasi atlet nasional di berbagai cabang olahraga. Peningkatan prestasi atlet nasional berkaitan kuat dengan harga diri, martabat, dan kebanggaan tersendiri dari suatu negara. Sehingga pemerintah harus menempatkan posisi olahraga, termasuk atlet nasionalnya sebagai aspek penting, disamping aspek lainnya. Untuk meningkatkan prestasi atlet nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan prestasi atlet nasional, seperti UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) dan UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan. Dalam implementasi nya, Kemenpora memilah telah memilah dua bidang kebijakan menjadi umum dan khusus. Kebijakan umum, yaitu berupa gambaran besar yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan prestasi atletnya.

Sedangkan kebijakan khususnya berupa perbaikan prestasi atlet nasional dalam bidang sepak bola. Dalam implemetasi kebijakan peningkatan prestasi atlet nasional ditemui faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung berupa: potensi generasi muda yang sangat besar, kerjasama antar-intansi pemerintah (pusat-daerah) dalam pembinaan atlet, dan tersedianya kebijakan pemerintah sebagai dasar pembinaan atlet. Sedangkan faktor penghambat berupa: belum adanya sinergitas antar lembaga keolahragaan dalam membina atlet, regenerasi atlet yang terhambat akibat rendahnya minat masyarakat untuk berolahraga, hambatan pengarahan bakat dan minat seauai dengan ketentuan internasional, buruknya pusat pelatihan atlet nasional, dan dukungan masyarakat yang terbilang kecil terhadap atlet nasional. Berbagai faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut juga harus disikapi oleh pemerintah Indonesia secara

bijaksana sebagai langkah meningkatkan prestasi atlet nasional.

Maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan prestasi atlet tidak bias dilepaskan dari adanya sinergi dan kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini DISPORA, KONI, FORMI, atlet, vendor, dan pelatih. Dari beberapa variabel, terdapat dua variabel yang sangat mempengaruhi terhadap peningkatan atlet berprestasi yaitu Pertama, sumber daya, di mana ada sumber daya keuangan/pendanaan dan sumber daya sarana dan prasarana yang masih dalam masalah yang belum terselesaikan. Pendanaan yang sangat minim sekali terhadap uang pembinaan, uang bonus dan juga uang jasa atlet pada saat event kejuaraan tingkat Provinsi. Pendanaan yang sangat minim akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan prestasi atlet. Selain itu, sumberdaya sarana dan prasarana juga masih dalam kondisi yang minim sekali dikarenakan banyaknya sarana olahraga yang belum layak atau ukuran yang belum standard, selain itu para atlet dan pelatih masih mempergunakan sarana olahraga dari pihak swasta dengan cara penyewaan dengan membayar sistem bayar iuran bulanan melalui club-club olah raga. Kedua, sikap para pelaksana, dimana variable ini diketahui adanya stakeholder yang tidak berperan aktif dikarenakan organisasi tersebut tidak beroperasi. Hal ini disebabkan karena para pelaksana tidak melakukan kebijakan keolahragaan di mana para pelaksana tidak mengetahui dan memahami apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Ketidak berperannya organisasi ini dikarenakan tidak cukup mampu dan memiliki pemahaman yang kurang akan menjalankan suatu organisasi. Hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan prestasi atlet. Kedua variable ini saling berkaitan dalam menjalankan perannya di bidang keolahragaan, dimulai dari pendanaan, pembinaan sehingga tercetaklah atlet-atlet berprestasi.

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan dari penelitian di lapangan mengenai sinergi pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet ada beberapa rekomendasi yang bias diajukan, yaitu: Pertama, membuat strategi Memorandum Of Understanding (MOU) dalam rangka peningkatan prestasi olahraga kepada semua pihak yang terkait dalam bidang keolahragaan contohnya; kerjasama dengan pihak-pihak sekolah swasta yang mempunyai banyak sarana dan prasarana olahraga yang dapat mendukung pada saat adanya event-event kejuaraan bergengsi baik tingkat Nasional ataupun Internasional. Kedua, sinergi pemangku kepentingan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan keolahragaan dimulai dari beberapa sumber, pertama meningkatkan sumberdaya pendanaan keolahragaan mulai dari uang pembinaan kepada atlet dan

pelatih, uang pemberian penghargaan (bonus) tingkat Provinsi dan juga uang untuk jasa atlet selama bertanding dalam suatu event kejuaraan.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti ingin menambahkan saran. Saran tersebut antara lain:

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang diajukan adalah:

1. Bagi Kemenpora hendaknya dapat meningkatkan dukungan baik materi maupun non materi dalam
2. Pengembangan olahraga secara menyeluruh agar kondisi keolahragaan dapat berada dalam kondisi yang terbaik
3. Kemenpora hendaknya merencanakan dan merencanakan untuk mengembangkan olahraga sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan mendapat dukungan penuh dan menjadi prioritas.
4. Perlu ditingkatkan kerjasama yang baik antar instansi keolahragaan, dukungan pemerintah dan membangun sinergisitas antar lembaga olahraga sehingga dapat lebih meningkatkan prestasi atlet.
5. Disarankan melakukan penelitian yang lebih lama, dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam, sehingga dapat diketahui permasalahan dan solusi dalam implementasi kebijakan.

#### **Ucapan Terimakasih**

Penulisan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

1. Seluruh Dosen S1 Administrasi Negara FISH Unesa
2. Dr. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing dan Ketua Prodi S1 Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya yang selalu memberikan dukungan moral kepada peneliti.
3. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti
4. Coach Ebrahim Inanlou dan Coach Glenn Clifton Apfel sebagai Pelatih saya yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Pihak Perbakin yang membantu peneliti dalam memberikan data dan ijin observasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Akhmad, Imran (2012) **KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN OLAHRAGA NASIONAL PADA FASE PEMBIBITAN**. Medan.

Asyiah, Adnan, dan Mubarak. 2017. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis*

- di Kabupaten Pasaman. *Journal of Publik Sector Innovation*.
- Bahtiar, Jamarudin, 2018, Kebijakan Pembinaan Atlet Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tenggara
- Dian Estu Prasetyo, Damrah dan Marjohan .2018. Evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga dalam *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, Volume 1, Nomor 2
- Dwi, H. (2016). *Fakta Sejarah Kiprah dan Prestasi Indonesia di Olimpiade*.
- Dwi Prayogo Utomo. 2018. *Stud Implementasi Kebijakan Terhadap Penghargaan Atlet Berprestasi*. Jakarta
- Fauzi Handoko Arif. 2021. *Sering bawa Emas Olimpiade, KOI Minta Cabang Olahraga Lain Tiru Cabang Bulu Tangkis*. Jakarta.
- Fitri Supratiwi. 2020. *Perbakin Jaring Atlet Muda Potensial Lewat Kejuaan Daring*. Jakarta
- Glenn Clifton Apfel. 2018. *Meraih Emas di Olympic Youth Games 2014 dan 2018*. Jakarta.
- Hadjarati, H. (2009). *Memberdayakan Olah Raga Nasional*. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 2(5), 204–220.
- Harahap, Insan Harapan. 2018. *Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Nasional dalam Journal of Entrepreneurship Management and Industry Volume 1 Nomor 4*.
- Husdarta, H. J. S. (2011). *Sejarah dan Filsafat Olahraga*. Bandung: Alfabeta.
- Humas Polhukam. (2017). *Kemenpora Siap Melaksanakan 4 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (2005)*. Indonesia.
- Jarot Sutrisno, Zulkarnaen, & Noh., M. M. (2012). *Peran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kabupaten Pontianak*. Universitas Tanjungpura.
- Junaydi Suswanto. 2019. *Menpora Optimistis Cabang Menembak Mampu Penuhi Target Emas*. Jakarta.
- Kamal. 2011. *Evaluasi Program Pembinaan Olahraga Tenis Lapangan Di Kota Padang*. *Journal media keolahragaan Indonesia*. 1(2).
- Kemenpora. (2017). *Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019*. Kemenpora (Vol. 2016–2019). Jakarta.
- Kemenpora. 2021. *Ini Bentuk Dukungan Kemenpora untuk Para Atlet yang Ikut Olimpiade Tokyo 2021*. Jakarta.
- Mahatma chryсна. 2020. *Undang Undang sistem keolahragaan Nasional*. Jakarta.
- Menkumham. 2015. *Undang-undang Nomor 3 tahun 2015A tentang Sistem Keolahragaan Nasional*.
- Nugroho, R. (2014). *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, Y. (2013). *Kesadaran Masyarakat Berolahraga untuk Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Nasional*. *Medikora*, XI(2), 219–228.
- Prof. Dr. Sumaryanti, M.S. 2020. *Jurnal Keolahragaan*. Departement Of Sport Science, Graduate School Of Universitas Negeri Yogyakarta.
- Permatasari, W., Alam, A. S., & Nas, J. (2011). *Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 49–60.
- Rahayu, A. (2015). *Asian Games IV 1962: Motivasi, Capaian, Revolusi Mental, dan Keolahragaan di Indonesia*. Jakarta: Nuril Happs.
- Soan, Untung Febrisius. 2017. *kebijakan dan strategi pembinaan olahraga prestasi daerah*. *Jurnal Sains Keolahragaan dan Kesehatan Volume 2 Nomor .*
- Siregar, M. F. (2008). *Matahari Olahraga Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sirait, dan Noer. 2021. *Implementasi kebijakan keolahragaan dan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet*. *JORPRES (Jurnal Olahraga Prestasi)*, 17 (1), 2021, 1-10
- Soepartono. 2000. *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Jakarta: Depdiknas
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Syafii, I. K. (2007). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- Tisna, G. D., & Sudarmada, I. N. (2007). Manajemen Olahraga. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibisono, dan Tukiman. 2017. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *Journal of Publik Sector Innovation*.
- Wiarso, G. (2007). Olahraga dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, IPTEK, dan Hiburan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

